



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/ 332 /LIT.05/10-15/01/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : Tiga Berkas
Hal : Hasil SPI 2021 dan Pelaksanaan SPI 2022

3 | Januari 2022

**Yth. Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/ Sekretaris
c.q. Inspektur Jenderal/ Inspektur Utama/ Inspektur (Daftar Lembaga Terlampir)
di Tempat**

Sehubungan dengan terselenggaranya Survei Penilaian Integritas (SPI) 2021 kami memberikan apresiasi dan berterimakasih atas partisipasi dan kerja sama Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (KLPD) Bapak/Ibu. Kegiatan ini dilakukan secara bersama untuk memetakan risiko korupsi dan membangun upaya-upaya pencegahan korupsi. Pada tahun 2021, SPI dilaksanakan secara elektronik di 98 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 504 Pemerintah Kabupaten/Kota. Terkait dengan hal tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu disampaikan:

1. Laporan Hasil Individual serta rekomendasi perbaikan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (KLPD) telah diintegrasikan dengan Jaringan Pencegahan KPK dan dapat diakses melalui platform JAGA di <https://jaga.id> dengan *username* dan *password* untuk dapat mengakses sebagaimana terlampir.
2. Indeks SPI 2021 merupakan penilaian K/L/PD secara keseluruhan dari berbagai unit kerja terpilih secara acak.
3. Kegiatan SPI 2022 akan dilaksanakan dengan mekanisme yang serupa dengan SPI 2021 (Terlampir formulir kepesertaan Survei Penilaian Integritas 2022 Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah).

Besar harapan kami Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (KLPD) Bapak/Ibu dapat kembali berpartisipasi dan menindaklanjuti rekomendasi secara proaktif dengan mengembangkan/ menyempurnakan upaya-upaya Pencegahan untuk memperkuat sistem integritas. Untuk koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Timotius Hendrik Partohap (Timotius.Partohap@kpk.go.id) dengan nomor telepon (021) 25578300 ext. 7391. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan ucapan terima kasih.



a.n. Pimpinan
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring,

Pahala Nainggolan

Tembusan:

1. Yth. Pimpinan KPK
2. Yth. Inspektur KPK

Lampiran Surat 1 (Daftar Penerima Surat)

Nomor : B/ 332 /LIT.05/10-15/01/2022

Tanggal : 31 Januari 2022

Lembaga Non-Kementerian

1. Badan Koordinasi Penanaman Modal
2. Badan Informasi Geospasial
3. Otoritas Jasa Keuangan
4. Badan Nasional Sertifikasi Profesi
5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
6. Kepolisian Negara Republik Indonesia
7. Badan Pengawas Obat dan Makanan
8. Badan Kepegawaian Negara
9. Badan Standardisasi Nasional
10. Komisi Aparatur Sipil Negara
11. Kejaksaan Agung
12. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
13. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
14. Mahkamah Agung
15. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
16. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
17. Badan Siber dan Sandi Negara
18. Badan Pengawas Tenaga Nuklir
19. BPJS Ketenagakerjaan
20. Badan Pusat Statistik
21. Badan Pengawas Pemilihan Umum
22. Arsip Nasional Republik Indonesia
23. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
24. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
25. Badan Narkotika Nasional
26. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
27. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
28. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
29. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
30. Badan Nasional Pengelola Perbatasan
31. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
32. Badan Tenaga Nuklir Nasional
33. Dewan Perwakilan Daerah
34. Dewan Perwakilan Rakyat
35. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
36. Komisi Pemilihan Umum
37. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
38. Komisi Yudisial
39. Lembaga Administrasi Negara
40. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
41. Lembaga Ketahanan Nasional
42. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
43. Mahkamah Konstitusi
44. Majelis Permusyawaratan Rakyat
45. Ombudsman Republik Indonesia
46. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
47. Sekretariat Kabinet
48. Bank Indonesia
49. Televisi Republik Indonesia
50. Radio Republik Indonesia
51. Komisi Penyiaran Indonesia
52. Lembaga Penjamin Simpanan
53. Badan Pengelola Keuangan Haji
54. Komisi Kejaksaan
55. Komisi Kepolisian Nasional
56. Dewan Jaminan Sosial Nasional
57. BPJS Kesehatan

Lampiran Surat 3 (Format Formulir Kepesertaan SPI 2022)
Nomor : B/ 332 /LIT.05/10-15/01/2022
Tanggal : 31 Januari 2022

(KOP SURAT KEMENTERIAN)

Nomor :
Tanggal :

FORMULIR KEPESERTAAN SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS ELEKTRONIK (E-SPI)
TAHUN 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Selanjutnya bertindak dan atas nama Kementerian

Dengan ini menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan Survei Penilaian Integritas Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Peran aktif kelembagaan ini termasuk dalam bentuk pelaksanaan kegiatan dan ketersediaan data seperti data pegawai, pengguna layanan, dan narasumber pakar yang dibutuhkan guna pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dalam pernyataan ini sekaligus menyertakan daftar *Person In-Charge* (PIC) kegiatan yang akan menjadi penghubung secara teknis kegiatan SPI Tahun 2022, yakni:

No	Nama	Jabatan	Nomor Handphone	Email

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2022
Sekretaris Jenderal/ Sekretaris
Utama/Sekretaris.....

(.....)

Formulir yang ditandatangani dapat dikirim melalui pos ke Gedung Merah Putih KPK Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950 dan melalui surat elektronik ke arrum.retnosari@kpk.go.id dan timotius.partohap@kpk.go.id.

Matriks Inisiatif Peningkatan Upaya/Kegiatan/Program Pencegahan

Disusun dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan Hasil Survei Penilaian Integritas 2021

No	Inisiatif Upaya Program/kegiatan Pencegahan	Kategori	Alokasi Anggaran	Pemangku Kepentingan	Tahun Pelaksanaan	Keterangan
1	Contoh: Perbaikan Manajemen ASN berupa....	Perbaikan Program Existing (Lama)	Rp. 125.000.000	KPK (Korsupgah), KemenpanRB, Kemendagri	2022	Program ini merupakan penyempurnaan dari program yang sudah dikerjasamakan dengan pihak KPK (Koruspgah) dengan target ..dan melibatkan ...OPD dst
2	Perbaikan Transparansi dan Akuntabilitas Barang dan Jasa berupa....	...				
3	Penyempurnaan kebijakan pengelolaan dan optimalisasi anggaran berupa...					
..						
4	Implementasi Kebijakan Benturan Kepentingan	Program Baru	Rp. 225.000.000	KemenpanRB, KPK ...		Program ini merupakan inisiatif baru menyasar...